



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Jln. A.Yani Km, 5,5 Simpang Badung ☎(0526) 2091500

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

Email : disdagkopukm@baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 900/ 26 / Disdagkopukm.I / 2023

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 sehingga berjalan lebih efektif dan efisien maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD.
 2. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup : Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa
 4. Bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran seluruh kegiatan yang dikelola.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak **2 Januari 2023** sampai dengan **31 Desember 2023**.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 17 Januari 2023

KERALA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

BERSON, SP., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650701 199903 1 003

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Up :
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Barito Timur di Tamiang Layang
 - Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Barito Timur di Tamiang Layang
 - Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Barito Timur di Tamiang Layang
3. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR : 900 / 26 / Disdagkopukm.1 / 2023
 TANGGAL : 12 Januari 2023
 TENTANG : TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PTK) DILINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Lembar 1

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Dana (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1. SEKRETARIAT					
1	JUNITARIATI, S.Sos NIP. 19680601 198903 2012 PEMBINA (IV/c) SEKRETARIS	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Administrasi Keuangan perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya JUMLAH	7.105.619.461,00 102.364.800,00 52.419.800,00 49.945.000,00 4.004.129.186,00 3.763.529.186,00 240.600.000,00 67.755.000,00 67.755.000,00 32.714.170,00 32.714.170,00 93.300.000,00 19.360.000,00 73.940.000,00 4.300.263.156,00	
2	ATI PERISTENI, S.PI NIP. 19780822 200701 2 010 PENATA Tk. I (III/d) KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan 5 Penyediaan Bahan Baccan dan Peraturan Perundang-Undangan 6 Fasilitas Kunjungan Tamu 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.816.000,00 32.816.000,00 383.206.545,00 10.655.500,00 40.974.445,00 9.077.000,00 28.000.000,00 14.400.000,00 49.200.000,00 230.899.600,00	

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Dana (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
			3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan JUMLAH	2,302,684,000.00 60,184,000.00 2,242,500,000.00 86,649,760.00 86,649,760.00 2,805,356,305.00	
II. BIDANG PERDAGANGAN				994,827,124.00	
3	ANDRI AMIANTO, ST NIP. 19820505 201001 1 046 PENATA Tk. I (III/d) KABID. PERDAGANGAN	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2) JUMLAH	43,535,100.00 43,535,100.00 43,535,100.00	
		PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di Wilayah Kerjanya 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan JUMLAH	160,999,747.00 160,999,747.00 80,416,800.00 51,489,400.00 28,927,400.00 241,416,547.00	
		STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan 2 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten 2 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	266,503,100.00 42,273,000.00 224,230,100.00 19,350,000.00 19,350,000.00	

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Dana (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
		PENGEMBANGAN EKSPOR	1 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Pameran Dagang Lokal JUMLAH	285.853.100,00 100.373.550,00 100.373.550,00	
		STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal JUMLAH	173.649.000,00 144.508.800,00 29.140.200,00 173.649.000,00	
		PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota JUMLAH	149.999.827,00 149.999.827,00 149.999.827,00	
III. BIDANG KOPERASI					
		PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Wilayah Kabupaten/Kota 1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangguhan serta Akuntabilitas Koperasi/Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota JUMLAH	100.230.350,00 41.648.750,00 58.581.600,00 100.230.350,00	
		PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota JUMLAH	59.851.250,00 59.851.250,00 59.851.250,00	
		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi JUMLAH	272.606.000,00 272.606.000,00 272.606.000,00	
4	BERTHA, SE, MM NIP. 19710916 200604 1 014 PEMBINA (IV/c) KABID. KOPERASI				

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Dana (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	
JUMLAH				272,606,000.00		
		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	267,580,910.00 267,580,910.00		
JUMLAH				267,580,910.00		
IV. BIDANG BINA USAHA MIKRO				877,826,900.00		
5	RINI AGUSTINA, S.Sos., M.Si NIP. 19780911 200502 2 005 PEMBINA (IV/a) KABID. BINA USAHA MIKRO DAN KECIL	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	175,100,000.00 175,100,000.00		
		JUMLAH				175,100,000.00
		PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 3 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 5 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	115,416,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 15,416,000.00		
		JUMLAH				115,416,000.00
		PENGEMBANGAN UMKM	1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	587,310,900.00 587,310,900.00		
		JUMLAH				587,310,900.00

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan/Jabatan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Dana (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
V. UPT PASAR TAMIANG LAYANG				53,790,050.00	
6	MARJUNO, S.SoS NIP. 19681210 199203 1 007 PENATA Tk. I (III/d) Pit. KEPALA UPT PASAR T. LAYANG	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	53,790,050.00 53,790,050.00	
JUMLAH				53,790,050.00	
VI. UPT PASAR TAMIANG LAYANG				53,790,050.00	
7	HARISAMEDES, A.Md NIP. 19771206 200604 1 016 PENATA (III/c) KEPALA UPT PASAR AMPAH	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	53,790,050.00 53,790,050.00	
JUMLAH				53,790,050.00	
JUMLAH I,II,III, IV, V DAN VI				9,786,122,095.00	

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BARITO TIMUR,


 BERSON, SP., MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19650701 199903 1 003